BAB I

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Parungkuda Tahun 2021 – 2026, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2021 sampai dengan 2026. Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi 2021 – 2026, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi masa bhakti 2021 – 2026, maka visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Sukabumi.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Sukabumi 2021 – 2026 yaitu :***” Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir dan Batin ”.***

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan;
21. Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 050/Kep.234-Kec. Parungkuda/2021 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Tahun 2021-2026.
22. **Maksud danTujuan**

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021- 2026 adalah :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026 yang memuat Visi, Misi,Tujuan, Sasaran,Kebijakan dan Program.
2. Sebagai salah satu pedoman bagi unsur pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan disusunnya dokumen Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2026 adalah:

1. Terlaksananya koordinasi antar unsur pimpinan dan staf di lingkungan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi maupun dengan lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Untuk memudahkan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Daerah baik Tahunan maupun Lima Tahunan.
   1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021– 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
  2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
  3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra;
  4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis;
  5. Penentuan Isu-Isu Strategi.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

* 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten .Adapun Tugas Pokok dan fungsi Organisasi akan diuraikan di bawah ini :

* + - 1. **Tugas Pokok dan Fungsi Camat**

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Kecamatan;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan;
4. Pemantauan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, meliputi pengkoordinasian di bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat; upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya, Sarana dan prasarana Wilayah, kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
5. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
6. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umu;
8. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
9. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
10. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
11. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan;
12. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
13. Pengelolaan administrasi, kepegawaian, kearsipan, keuangan, perencanaan dan perlengkapan;
14. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupatiuntuk melaksanakan sebagaian urursan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
16. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan;
17. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
19. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

* + - 1. **Sekretaris Kecamatan :**

**Ringkasan Tugas dan Fungsi**

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat;
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi camat dibidang kesekretariatan;
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
4. Penyusunan rencana dan program kerja sekretariat;
5. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
6. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dibidang kesekretariatan;
7. Pelayanan administratif kepada unit organisasi organisasi dilingkungan kecamatan;
8. Pengkajian dan penyusunan rencana kerja (renja) kecamatan;
9. Pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) kecamatan;
10. Pengkajian dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan
11. Pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kecamatan
12. Pembinaan kesejahteraan pegawai dilingkungan kecamatan;
13. Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kecamatan;
14. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
16. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
17. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,sekretariat membawahkan :
18. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
19. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
    * + - 1. **Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program :**

**Ringkasan Tugas dan Fungsi**

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan, perencanaan dan Program.

Merencanakan dan melaksanakaaan kegiatan sub bidang keuangan, Perencanaan dan Program dengan cara merencanakan kegiatan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta menyusun dan menganalisa bahan kebijakan, bahan pedoman fasilitasi sub bagian keuangan, perencanaan dan program, menyusun laporan, melakuklan hubungan kerja sesuai dengan kebijakan teknis daerah dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program;
2. Pengumpulan dan pengolahan data keuangan, perencanaan dan evaluasi;
3. Penyusunan anggaran di lingkungan kecamatan;
4. Pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan dilingkungan kecamatan;
5. Penyusunan laporan keuangan;
6. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai dilingkungan kecamatan;
7. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
8. Pembinaan dan fasilitasi teknis di bidang perencanaan dan program di lingkkungan kecamatan;
9. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) kecamatan;
10. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) kecamatan;
11. Penyiapan bahan penyusunan dan laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
12. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kecamatan;
13. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan kecamatan;
14. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
16. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
    * + - 1. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Ringkasan Tugas dan Fungsi**

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang umum dan kepegawaian;
2. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
4. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
5. Pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang,perlengkapan dan kerumahtanggaan;
6. Penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
7. Penyusunan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan kecamatan;
8. Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
9. Pengelolaan kepegawaian;
10. Pengelolaan front office penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan;
11. Pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkkungan kecamatan
12. Pelaksaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
14. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
    * + 1. **Kepala Seksi Pemerintahan**

**Ringkasan Tugas dan Fungsi**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang tata pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Penyusun rencana dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan;
2. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan teknis pemerintahan;
3. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan;
4. Perumusan prosedur dan kriteria penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan;
5. Pembinaan dan pengawasan anggaran pendapatan belanja desa, administrasi desa;
6. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dengan unit kerja terkait;
8. Pelaksanaan pembinaan kelurahan;
9. Pengkoordinasian pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa, pimppinan dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD);
10. Pelaksanaan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
11. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan pembinaan dibidang pendapatan asli daerah dan pertanahan sesuai kewenangan kecamatan;
12. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
13. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan produk hhukum pemerintahan desa;
14. Pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta/masyarakat;
15. Pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat di bidang pemerintahan;
16. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa;
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
18. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
19. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
20. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
    * + 1. **Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

**Ringkasan Tugas dan Fungsi**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum secara ex-officio merupakan Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pamong Praja.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. Penyusunan prosedur dan kriteria penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaa ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;
7. Pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
8. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
9. Pelaksanaan koordinasi pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan/atau yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
10. Pelaksanaan koordinasi penanganan kasus-kasus di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
11. Pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
12. Pembinaan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaann ketentraman dan ketertiban umum secara swadaya (Pam Swakarsa);
13. Pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
14. Pelaksanaan fungsu lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
15. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
17. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
    * + 1. **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

**Ringkasan Tugas dan Fungsi :**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat;
3. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat;
4. Penyusunan prosedur dan kriteria penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat;
5. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan;
6. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan perangkat daerah terkait;
7. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan ekonomi;
8. Pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat dibidang pemberdayaan masyarakat;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
12. Pelaporan hasil pelaksaan tugas.
    * + 1. **Kepala Seksi Sosial dan Budaya**

**Ringkasan Tugas dan Fungsi :**

Seksi Sosial dan Budaya di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan dibidang Sosial dan Budaya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sosial dan Budaya;
2. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan dibidang Sosial dan Budaya;
3. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi dibidang Sosial dan Budaya;
4. Penyusunan prosedur dan kriteria penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang sosial dan budaya;
5. Penyajian data dibidang sosial dan budaya;
6. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan keagamaan; program pendidikan; generasi muda; keolahragaan; kebudayaan; kepramukaan; perlindungan perempuan; dan kesehatan masyarakat; fakir miskin; perlindungan

anak, sosial, bencana, rutilahu; Program keluarga berencana dan keluarga sejahtera; ketenagakerjaan dan perburuhan; dengan perangkat daerah terkait

1. Pembinaan Pemerintahan desa/kelurahan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat di bidang sosial dan budaya;
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;dan
6. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
   * + 1. **Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah**

**Ringkasan Tugas dan Fungsi :**

Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah;
2. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan di bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
3. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan peningkatan partisipasi pembangunan kecamatan;
5. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, bahan rekomendasi, pengendalian dan koordinasi data di bidang penataan ruang dan pemukiman;
6. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, bahan rekomendasi, pengendalian dan koordinasi data di bidang penataan ruang dan pemukiman;
8. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan perangkat daerah terkait;
9. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
10. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah;
11. Pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat di bidang pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
13. Penyusunan prosedur dan kriteria penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana Prasarana Wilayah;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
15. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
17. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

**2.1.2 Susunan dan Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan:
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Sub BagianKeuangan, Perencanaandan Program;
5. Seksi Tata Pemerintahan.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Seksi Sosial Budaya;
9. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan Struktur Organisasi**

**2.2. Sumber Daya pada Kecamatan Parungkuda**

**CAMAT**

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI

SEKSI PELAYANAN UMUM

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

**SEKRETARIS**

**KECAMATAN**

a. Sumber daya aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 21 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Kondisi Pegawai (PNS dan PTT)**

**pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Laki-Laki** | **Perempuan** | **Total** |
| 1 | **Jumlah Pegawai** |  |  |  |
| * PNS | 12 | 4 | 16 |
| * CPNS | - | - | - |
| * TKS | 4 | 1 | 5 |
| **Jumlah** | **16** | **5** | **21** |
|  |  |  |  |  |
| 2 | **Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:** |  |  |  |
| 1. Golongan IV | 1 | - | 1 |
| 1. Golongan III | 6 | 4 | 10 |
| 1. Golongan II | 3 | - | 3 |
| 1. Golongan I | 2 | - | 2 |
| **Jumlah** | **12** | **4** | **16** |
|  |  |  |  |  |
| 3 | **Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejangan Terakhir :** |  |  |  |
| 1. Diklatpim III | 3 |  | 3 |
| 1. Diklatpim IV/Adum | 1 | 1 | 2 |
| **Jumlah** | **4** | **1** | **5** |
| 4 | **Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :** |  |  |  |
| 1. Strata 2 (Magister) | 4 | 1 | 5 |
| 1. Strata 1 (Sarjana) | 3 | 1 | 4 |
| 1. Diploma | - | - | - |
| 1. SLTA | 3 | 2 | 5 |
| 1. SLTP | 2 | - | 2 |
| 1. SD | - | - | - |
| **Jumlah** | **12** | **4** | **16** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | **Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa :** |  |  |  |
| 1. L-IV | - | - | - |
| b. L-II |  |  |  |
| **Jumlah** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** |

**Tabel 2.2**

**Daftar Nama pegawai Pada SKPD Kecamatan Parungkuda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama/Nip** | **Jabatan** | **Golongan** | **Ket** |
| 1 | **Deden Sumpena, S.Pd.I, S.Ip, M.Si**  NIP. 197601022002121005 | Camat | IV/a |  |
| 2 | Ikhsan Muchlis Sani, S.STP,M.ec.Dev  NIP. 19861220 200602 1 001 | Sekcam | III/d |  |
| 3 | Muhamad Lauzuardi Taher, SH  NIP. 19680104 200701 1 006 | Kasi  Saran dan Prasarana Wilayah | III/d |  |
| 4 | Rini Sulistiawati, S.IP  NIP. 19760504 200701 2 008 | Kasi  Pemerintahan | III/d |  |
| 5 | Iyus Hermawan, S.Ip, M.Si  NIP. 19780724 200801 1 004 | Pemberdayaan Masyarakat | III/d |  |
| 6 | Saep Purnama, S.IP  NIP. 19820907 200801 1 006 | Kasubag KPE | III/b |  |
| 7 | Dadang, SE  NIP. 19651218 200604 1003 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | III/b |  |
| 8 | Ida Rosida  NIP. 19640216 198603 2 012 | Pengadministrsi Umum Kasi Sosbud | III/b |  |
| 9 | Wiwi Rohilah  NIP. 19651101 198602 2 002 | Pengadministrasi Kasi Sarpraswil | III/b |  |
| 10 | Asmawati, SE  NIP. 19820319 201411 2 002 | Pengelola Kepegawaian | III/a |  |
| 11 | Encep Hendra, S.Ip  NIP. 19720205 200906 1 002 | Pengelola Seksi Pemderdayaan | III/a |  |
| 12 | Janten Firmansyah Rusmana  NIP. 19830910 200801 1 006 | Pengadministrasi Sarana dan Prasrana | II/d |  |
| 13 | Ade Dedi Supriadi  NIP. 19750223 200901 1006 | Pengadministrasi keuangan | II/d |  |
| 14 | Dedi Suryadi  NIP. 19730531 200701 1 008 | Pengadministrasi umum Seksi Pemerintahan | II/b |  |
| 15 | Suparman  NIP. 19640604 200701 1008 | Pengadministrasi Persuratan | I/d |  |
| 16 | Ujat Sudrajat  NIP. 19700515 200701 1 003 | Pengadministrasi Seksi Pemerintahan | I/d |  |
| 19 | Dena Nugraha Atmaja, Amd | Tenaga Administrasi |  |  |
| 20 | Ina Siti Nurjanah | Tenaga Administrasi |  |  |
| 21 | Irman Maulana | Tenaga Administrasi |  |  |
| 22 | Cucu S | Petugas Kebersihan |  |  |
| 23 | Nanda Rohenda | Supir |  |  |

b. Sarana Prasarana Penunjang

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, berdasarkan kondisi akhir bulan Juni 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Kondisi Sarana Prasarana**

**pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sarana Prasarana | Banyak | Kondisi | |
| Baik | Rusak/  Kurang Baik |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bangunan Gedung   * Bangunan Gedung Kantor * Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain/Aula Kecamatan * Bangunan Rumah Dinas Kecamatan | 1 Unit  1 Unit  1 Unit | baik  baik  - | -  -  Kurang baik |
| 2 | Kendaraan Roda 4 | 1 Unit | Baik | - |
| 3 | Kendaraan Roda 2 | 10 Unit | 8 Baik | 2 Rusak |
| 5 | Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor   * Rak Besi Metal * Rak Kayu * Filling Besi/Metal | 8  2  8 Unit  - | baik  baik  -  - | -  -  -  Kurang baik |
| 6 | Alat Kantor Lainnya   * Papan Nama Instansi * Papan Visual * Papan Pengumuman * Alat Kantor Lainnya | 1  1  1 | -  -  Baik | Rusak  Kurang Baik |
| 7 | Alat Rumah Tangga/Mebeulair   * Meja ½ Biro * Meja Rapat * Meja Panjang * Kursi Tamu * Kursi Rapat * Kursi Besi Metal * Kursi * Kursi Kerja * Kursi Putar * Rak Besi * Lemari Besi * Lemari Kayu * Filling Kabinet | 20 bh  7 Unit  1 buah  4 unit  3 Unit  75 buah  -  -  10 buah  3 Unit  3 Unit  2 Unit  5 Unit | -  -  -  2 baik  2 Baik  baik  -  -  6 baik  baik  baik  -  - | Rusak  Kurang Baik  Kurang baik  2 rusak  1 Rusak  4 Kurang  Rusak  Kurang Baik |
| 8 | Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) |  |  |  |
|  | * TV | 2 Unit | 1 Baik | 1 kurang |
|  | * Sound System | 1 Unit | Baik |  |
|  | * Alat Ukur Digital | - Unit | Baik |  |
|  | * Jam Dinding | 8 | 6 baik | 2 kurang |
|  | * Tiang Bendera | 1 Unit | - | rusak |
|  | * Aquarium | - | - |  |
|  | * Gorden | 2 unit | Baik |  |
|  | * Alat Pemadam Portable | 1 Unit | 1 Baik | - |
|  | * Penyekat Dinding | 1 unit | - | rusak |
|  | * Mimbar | 1 | baik |  |
|  | * Mesin Penghisap Debu | 1 | - | KB |
|  | * AC | 5 Unit | Baik |  |
|  | * Karpet |  | - |  |
|  | * Tempat Tidur | - | - |  |
| 9 | Peralatan Mini Komputer   * PC Unit * Laptop * Notebook * Hardisk ekternal * CPU | 7 Unit  8 Unit  -  -  1 unit | 2 Baik  8 Baik  -  -  baik | 5 rusak  - rusak  - |
| 10 | Peralatan Personal Printer   * Printer | 2 Unit | - | 2 rusak |
| 11 | Alat Studio dan Alat Komunikasi   * Proyektor + Attachment * Camera Digital * Antene UHF Portable * CCTV * Alat Komunikasi Radio SSB | 1 Unit  -  1 buah  -  -  1 unit | Baik  -  baik  -  -  Baik |  |
| 12 | Aset Tetap Lainnya   * Buku dan Perpustakaan | 3000 Unit | Baik |  |

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian (Pengelola barang)

1. Wilayah cakupan tugas Kecamatan Parungkuda

Luas Kecamatan Parungkuda yaitu 2.710 Ha. Dilihat dari wilayah administrasinya, Kecamatan Parungkuda terdiri dari 8 ( delapan) Desa, 71 RW, dan 257 RT. Desa-desa yang termasuk wilayah Kecamatan Parungkuda adalah sebagai berikut:

1. Desa Parungkuda
2. Desa Sundawenang
3. Desa Palasarihilir
4. Desa Pondokasolandeuh
5. Desa Langensari
6. Desa Kompa
7. Desa Babakanjaya

Batas administrasi Kecamatan Parungkuda adalah sebagai berikut:

* Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cicurug dan Kecamatan Cidahu
* Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ciambar
* Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibadak
* Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cibadak

**2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Parungkuda**

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Parungkuda berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Parungkuda Tahun 2021 – 2026, sebagaimana disajikan pada tabel 2.3 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Parungkuda**

**Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021**

| NO | Indikator Kinerja sesuai  Tugas dan Fungsi | **Realisasi Capaian Tahun ke-** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Pembuatan Akta Jual Beli / Akta hibah | 651 | 705 | 700 | 612 | 244 |
| 2. | Pembuatan Kartu Keluarga | 543 | 150 | 50 | 50 | 149 |
| 3. | Perekaman Kartu Tanda Penduduk | 2.780 | 2.785 | 1.147 | 289 | 838 |
| 4. | Rekomendasi Ijin Mendirikan bangunan Rumah Tinggal | 25 | 37 | 41 | 31 | 22 |
| 5. | Pembuatan Ijin Keramaian | 16 | 29 | 10 | 13 | 9 |
| 6. | Pembuatan Surat Pindah | 413 | 350 | 393 | 787 | 756 |
| 7. | Pelayanan Akta Kelahiran | - | - | - | - | - |
| 8. | Realisasi PBB | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 81% |
| 9. | Desa yang menerima Program P3K | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 |
| 10. | Desa yang menerima Program PNPM | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 11. | Tercapainya Jumlah Target PBB | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 81% |

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Indikator yang tertuang dalam tabel 2.4.itu merupakan indicator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda dan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (tabel 2.4), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi .Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam table 2.5, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Kecamatan Parungkuda**

**Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 s/d 2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Anggaran pada tahun** | | | | | **Realisasi Anggaran tahun** | | | | | **Persentase antara realisasi &angg pd tahun** | | | | | **Rata – rata pertumbuhan** | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** | ***14*** | ***15*** | ***16*** | ***17*** | ***16*** |
| **Belanja daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. BTL  -Belanja Peg |  | 1.418.096.186 | 2.016.978.465 | 2.249.256.162 | 2.231.494.197 |  | 1.337.522.973 | 1.997.057.308 | 2.233.061.426 | 2.218.248.162 |  | 94,32 | 99,01 | 99,28 | 99,41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b.Belanja Langsung |  | 912.909.180 | 1.688.193.863 | 1.659.688.642 | 967.168.676 |  | 901.883.200 | 1.359.873.630 | 1.267.922.300 | 947.901.778 |  | 96,47 | 80,45 | 76,39 | 98,12 |  |  |
| **Total** |  | **2.331.005.366** | **3.705.172.328** | **3.908.944.804** | 3.198.662.873 |  | **2.239.406.173** | **3.356.930.938** | 3.500.983.726 | 3.166.149.940, |  | **96,07** | **90,60** | **89,56** | **98,98** |  |  |

Sumber :KaSubag.Keuangan

**2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Kecamatan Parungkuda**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra yang telah dibuat tahun sebelumnya yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan kearah lokasi pengembangan macam dan jenis pelayanan yang dibutuhkan pada Lima Tahun Mendatang.

* + 1. **Jenis dan Macam Pelayanan**

Sesuai dengan kewenangan Camat sebagaimana diatur pada Pasal 127 UU No. 23 tahun 2014, PP Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2020, layanan Publik bias diberikan atau di legalisasikan oleh Camat adalah :

1. Pembuatan KTP/KK
2. Pembuatan IMB RumahTinggal Villa dan Pagar
3. Peralihan /Mutasihak Atas tanah,jual beli, Hibah.
4. Legalisasi SPOP tanah / bangunan.
5. Rekomendasi IMB Bangunan Komersial, SITU/HO, SIUP.
6. Visum Keproyekan.
7. Legalisasi hak Pertanahan.
8. Legalisasi KeteranganTidak Mampu.
9. Izin Keramaian;
10. Rekomendasi Proposal;
11. Legalisasi pengajuan Jamkesmasda;
12. BPNT.
13. Legalisasi Keterangan lainnya.
    * 1. **Tantangan terhadap pengembangan pelayanan**

Dalam melaksanakan pelayanan memang tidak terlepas dari adanya

Tantangan dan kendala, baik itu dari factor alam, manusia maupun sarana dan prasarana, diantaranya :

1. Luasnya wilayah Kecamatan Parungkuda yang terdiridari 6 desa,49 Rw dan 202 Rt dimana ada beberapa lokasi yang sulit dijangkau kendaraan roda 2 (dua), sehingga menyebabkan kesulitan kalau ingin melaksanakan pembinaan langsung ke lapangan;
2. Masih minimnya sarana prasarana penunjang, seperti computer yang dimiliki Kantor Kecamatan Parungkuda , sehingga kalau ingin menggunakan alat tersebut harus bergiliran, padahal beban pekerjaan pada beberapa Kepala Seksi sangat berat dan banyak.Dalam melaksanakan pekerjaaannya menggunakan sarana milik pribadi yang dibawa ke kantor;
3. Jumlah pegawai banyak, namun beberapa diantara SDM perangkat kecamatan yang ada masih kurang professional untuk menyelesaikan tugas dan beban kerja, sehingga penyelesaian terhadap beberapa jenis pekerjaan yang tingkat kesulitannya cukup rumit menjadi terhambat;
4. Jumlah pegawai kurang dan kebanyakan pegawai yang belum memiliki kompetensi dasar dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsinya;
5. Belum semua Kepala Seksi diperlengkapi kendaraan operasional dari kantor, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan menggunakan sarana dan prasarana milik pribadi.
   * 1. **Peluang terhadap pengembangan pelayanan**
6. AdanyaTuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah;
7. Adanya Dukungan dari atasan langsung;
8. Target pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik dan benar;
9. Adanya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

* 1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Parungkuda**

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran Kecamatan menjadi berkurang.Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah.dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2020, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten, sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan baru sedikit diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan.Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1. yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

**Pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi**

| **Aspek Kajian** | **Capaian/Kondisi Saat ini** | **Standar yang Digunakan** | **Faktor yang Mempengaruhi** | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTERNAL**  **(KEWENANGAN SKPD)** | **EKSTERNAL**  **(DILUAR KEWENANGAN SKPD)** | **Permasalahan Pelayanan SKPD** | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | |
| * Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Parungkuda | Belum terlaksana sesuai dengan aturan perundangan sebagaimana dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, jika dikaitkan dengan keharusan Musrembang terintegrasi | -Rekapitulasi  Prioritas Usulan  dalam RKPDes | * Dibentuknya delegasi Tk. Kecamatan dalam upaya memperjuangkan hasil usulan RKPDes | * Adanya Forum SKPD untuk memilih hasil Usulan RKPDes | * Belum dapat memenuhi kebutuhan usulan RKPDes | |
| Mengikuti musrenbang Kabupaten | Belum terlaksana sesuai dengan aturan perundangan sebagaimana dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | -Rekapitulasi  Prioritas Usulan  dalam RKPDes | * Dibentuknya delegasi TK. Kecamatan dalam upaya memperjuangkan hasil usulan RKPDes | * Menentukan keputusan hasil Kajian usulan dalam format penajaman * Pendekatan dangan berbagai pihak untuk pengajuan usulan (Pihak Aspirasi, Teknokrasi dan instansi) | * Belum dapat memenuhi kebutuhan usulan RKPDes | |
| Pembinaan di bidang Ketentraman dan Ketertiban | Koordinasi pemantauan dan pembinaan wilayah di bidang trantib belum terlaksana sesuai kondisi nyata kecamatan. | -Penugasan Kaur Trantib masing-masing desa untuk pengawasan di lapangan | - Dukungan dari aparat kecamatan | * Adanya koordinasi dengan instansi terkait (Polsek dan Koramil) | * Belum dapat menjangkau sampai pelosok karena kondisi geografis Wilayah Kecamatan Parungkuda |
| Anggaran SKPD | Belum termaksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi  sebagai pelaksana teknis tugas camat, disebabkan anggaran yang boleh diajukan kecamatan hanya program rutin yang sama disetiap SKPD, sedangkan untuk menunjang tupoksi Kepala seksi tidak tercantum dalam Permendagri no.13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. | **-**Disesuaikan dengan anggaran yang ada | Tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung operasional SKPD | * Adanya pelimpahan kewenangan untuk Penyusunan anggaran dari Tim Anggaran Kabupaten ke Kantor Kecamatan | Masih kurangnya dukungan anggaran | |
| * Monografi Kecamatan | monografi kecamatan sudah ada , tetapi penyediaan dan pemutakhiran data kecamatan belum dapat dilakukan secara akurat | Tersusunnya monografi kecamatan, dalam rangka menyediakan data statistik kecamatan secara akurat. | Adanya pegawai yang rutin mengisi data sesuai dengan perubahan kondisi Wilayah kecamatan | Rapat Koordinasi pembahasan Monografi Kecamatan sesuai dengan data dari dinas/ instansi | Belum optimalnya pengisian data pada Monografi | |
| Profil Kecamatan | Format Propil kecamatan berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi lainnya | -Penggunaan Propil disesuaikan dengan kebutuhan data | -Koordinasi dengan antar Kasi dalam pengumpulan data | -Dibentuknya forum SKPD Satu Data | Data yang tidak sama | |
| -Kondisi SDM (Pegawai) yang memadai | * Kualitas Sumber daya manusia yang masih minim hal ini dapat dilihat komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh Personil Kantor Kecamatan Parungkuda sehingga dalam memberikan pelayanan kurang maksimal dan kekurang mampuan mengatasi masalah | Pemberian pelayanan yang cepat, tepat dengan kemampuan, kemauan dan keramahan petugas | -Stándar pelayanan yang diberikan asal memuaskan masyarakat  - Adanya motivasi kerja dari beberapa Pegawai Kecamatan Parungkuda yang tinggi | Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur SPM dalam pemberian pelayanan | * Rendahnya SDM (pegawai) | |
|  | * Kekurangan personil (Sumber daya Manusia) di setiap seksi. | -Menggunakan petugas yang ada | Perekrutan tenaga lokal yang mempunyai keahlian di bidang TI (Non-PNS) | Adanya Pengadaan petugas tambahan yang ahli di bidang TI untuk semua seksi | * Kurangnya SDM yang memahami TI | |
|  | * Masih adanya pegawai yang bingung mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya | -Petugas yang mampu dan mau mengambil alih pekerjaan | - Adanya suasana kerja yang kondusif dengan team work yang baik | - Memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengikuti berbagai diklat | * Kurangnya pegawai memahami Tupoksi | |
| * Jumlah Sarana dan Prasarana | * kendaraan operasional bagi para Kasi kurang . * Sarana komputer terbatas | * Memakai kendaraan pribadi * Menggunakan milik pribadi pegawai | -Adanya koordinasi diantara pegawai | - Adanya tambahan kendaraan operasional dan komputer | -Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang | |
| * Pembuatan Ruang Data kecamatan | * Belum tersedianya ruang data kecamatan, sehingga penyediaan dan pemutakhiran data kecamatan belum dapat dilakukan secara akurat | * Data yang ada dilaksanakan/dikerjakn oleh masing-masing urusan | -Menggunakan ruangan yang ada di kantor kecamatan | - Adanya dukungan tambahan ruangan ke pemerintah daerah | - Belum tersedianya Ruang data | |
| * Pembangunan Ruang E-KTP | * Menggunakan ruangan yang ada   Yang tidak memadai sumpek dan sempit | * Pelaksanaan pembuatan KTP tidak nyaman | * Adanya ruangan yang memadai untuk pelayanan | * Adanya dukungan pemerintah daerah untuk kebutuhan tersebut | -Belum tersedianya ruang E-KTP yang memadai | |
| * Pembangunan Rumah Dinas | * Adanya Rumah dinas | * Masih menggunakan rumah dinas lama | -Adanya rumah dinas yang memadai | Adanya dukungan pemerintah daerah untuk kebutuhan tersebut | * Rumah dinas yang Belum ada Rumah Dinas baru ada tanah nya | |
| * Koordinasi pembuatan Batas dan Patok Desa | - Belum tersedianya patok desa di Ds Titisan, Parungkuda, Cimangkok,  Sukamaju, Semplak dan Priangajaya | - Batas Alam digunakan sebagai ciri pembatas | -Batas desa yang telah ditetapkan oleh masing-masing wilayah desa, ditetapkan bersama-sama dengan Muspika | -Adanya dukungan dari Pemda tentang pembahasan Batas Desa (RTRW) | - Belum tersedianya batas dan patok desa | |
| * Fasilitasi dan koordinasi pembangunan prasarana fisik jalan lintas antar desa ( jalan kabupaten) | * Belum terbangunnya prasarana fisik jalan lintas desa/ jalan kabupaten yang kondisinya rusak berat / poros jalan | * Menggunakan jalan yang ada dan bergelombang | * Motivasi masyarakat untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan yang ada. | * Adanya dukungan dana untuk pengaspalan jalan | * Pelayanan belum terpenuhi sesuai dengan target yang diharapkan | |
| * Kondisi Kantor Desa | Dari 6 desa, 4 desa perlu diperbaiki. | * Masih menggunakan kantor yang ada | * Pembuatan Proposal untuk pengajuan pembangunan balai desa | - Adanya bantuan pembangunan kantor desa | -Kurang memadainya bangunan desa | |
| -Administrasi Desa | Belum tertibnya administrasi pemerintahan desa | * Administrasi ada tapi kurang lengkap | * Adanya diklat untuk perangkat desa | * Perlunya diadakan Diklat untuk manajemen perkantoran desa | -Belum tertibnya administrasi desa | |
| ***Sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemkab Sukabumi*** |  |  |  |  |  | |
| Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi | Kecamatan dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah | Setándar Operasional Kecamatan Parungkuda sesuai ketentuan peraturan yang berlaku | Untuk sebagian besar memang sudah ada pendelegasian manajemen koordinasi dan pembinaan pembangunan berbasis masyarakat kepada kecamatan | kebutuhan pendelegasian manajemen koordinasi dan pembinaan pembangunan berbasis masyarakat dan kewilayahan kepada Kecamatan sbg langkah strategis percepatan penanggulangan kemiskinan & peningk IPM | Tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 126 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 tahun 2007 belum bersifat operasional | |

Permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Parungkuda dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dari beberapa pandangan di masing-masing seksi, antara lain :

1. Seksi Pemerintahan,
2. Kurang maksimalnya kualitas SDM aparatur Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
3. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW;
4. Kurangnya pemahaman tentang Perdes dan Administrasi Keuangan Desa;

d. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP, KK dan Akte Kelahiran.

e. Masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman;

1. Kondisi geografis, menyebabkan jauhnya jangkaun ke tempat pelayanan, khususnya di bidang administrasi kependudukan karena proses pembuatan dokumen kependudukan masih dikerjakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah,
3. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan. Wujud gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan menjadi rendah;
4. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah perdesaan meskipun sudah dibantu pendanaannya dari ADD.
5. Tingginya angka kerusakan Infrastruktur, seperti jalan dan jembatan;
6. Belum dimilikinya sarana pasar tradisional. Pasar yang ada berupa rumah penduduk yang dirubah menjadi toko.
7. Belum optimalnya pengeloaan persampahan, karena tidak adanya TPA.
8. Belum sinkronnya peraturan perundang-undangan dengan kenyataaan di lapangan mengenai prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan di desa-desa.
9. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
10. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
11. Cakupan wilayah yang sangat luas menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban.
12. Seksi Sosial dan Budaya
13. Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah;
14. Tingginya angka kemiskinan.
15. Tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni
16. Tingginya tingkat kerusakan Ifrastruktur pendidikan bidang pendidikan keagamaan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Belum terorganisirnya Lembaga Kemasyarakatan di Kec.Parungkuda;
2. Peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan belum optimal sehingga wujud gotong royong masih rendah;
3. Kesadaran masyarakat tentang hukum masih rendah;
4. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah.
   1. **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, bahwa capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021-2026 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah :

***“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi***

***yang Religius Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir dan Batin”.***

Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai kesejahteraan da kemajuan masyarakat Kabupaten Sukabumi sangat dipengaruhi oleh sikap keberagaman (religious, maju dan inovatif

Sejalan dengan VISI di atas, maka ada empat MISI Utama yang akan dijalankan, yaitu :

1. *Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;*
2. *Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan;*
3. *Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah;*
4. ***Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntable****.*

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi, khususnya terkat degan tugas dan fungsi Keamatan Parungkuda terdapat pada Misi ke-4 (empat) yaitu ***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntable”***

Penyelarasan Misi-Tujuan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

* + - 1. Misi 1 :Membangun sumber daya manusia yang beriman dan berdaya saing

Tujuan: terwujudnya manusia yang brekualitas,berdaya saing dalam lingkungan yang religious.

* + - 1. Misi 2 : Meningkatkan produktifitas dan daya saing ekonomi agrobisnis dan parawisata berkelanjutan.

Tujuan ;Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan parawisata berkelanjutan,

* + - 1. Misi 3 : Meningkatkan konektifitas utuk percepatan pertumbuhan wilayah.

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas

* + - 1. Misi 4 ; Meningkatkan kulaitas pelayanan publik yang inovatif,professional dan akuntabel.

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan inovatif perofesional dan akuntabel.

Berdasarkan cascading RPJMD merujuk pada Misi ke empat dengan rincian sebagai berikut:

**Misi 4** : **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel**

| **Tujuan** | **Sasaran Strategis** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur | |
| Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan e-government | |
| 17.01.03 | Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan terpadu, transparan, dan akuntabel |
|  | Meningkatnya inovasi daerah | Meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/urusan daerah | Mendorong inovasi perangkat daerah berkelanjutan | |

Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 akan difokuskan dalam 6 (enam) prioritas. Hal ini akan menjadi panduan dalam pelaksanaan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Rincian 6 (enam) prioritas pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan;
2. Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan social;
3. Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah;
4. Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan;
5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah;
6. Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan *e-government* dan kualitas pelayanan publik.

Prioritas pembangunan di atas menjadi fokus utama dalam pencapaian sasaran pembangunan, sasaran prioritas, tujuan daerah, visi daerah, hingga misi daerah. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, prioritas pembangunan

**TABEL 3.2.**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Kecamatan Parungkuda**

**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Visi : *Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri*** | | | | |
| No | Misi dan Program  KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
| Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Optimalisasi Pelayanan Publik Khususnya Dibidang Kesehatan Pendidikan Dan Infrastruktur Daerah | 1. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung 2. Masih kurangnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan Tupoksi 3. Kuantitas dan Kualitas SDM pegawai belum optimal 4. Budaya kerja aparatur kurang memadai 5. Masih kurangnya koordinasi antar SKPD di Kecamatan Parungkuda | 1. Tidak konsistennya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat pada kontek otonomi / kewenangan daerah 2. Dukungan sarana prasarana dan dana yang kurang memadai 3. Kurangnya pemahaman terhadap Tupoksi 4. Kurangnya kemampuan pegawai untuk mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya | 1. Adanya dukungan dari atas langsung’ 2. Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah 3. Adanya motivasi kerja pegawai Kecamatan Parungkuda yang tinggi 4. Adanya kondisi lingkungan kecamatan yang kondusif 5. Team Work yang baik di Kecamatan Parungkuda sehingga saling mendukung dalam pekerjaan |

* 1. **Telahaan Renstra K/L dan Renstra**

Keterkaitan Renstra Kecamatan Parungkuda dengan RTRW Kabupaten Sukabumi penekanannya bahwa rencana program Kecamatan Parungkuda dalam Rencana Strategis pada implementasinya harus selaras dengan arahan dan struktur ruang wilayah Kabupaten Sukabumi. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Kabupaten Sukabumi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032. RTRW ini merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan strategis kecamatan. Karena itu pembangunan di wilayah Kecamatan Parungkuda harus berpedoman pada peruntukan ruang menurut RTRW Kabupaten Sukabumi.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sukabumi memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfataan ruang. Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Sukabumi serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sukabumi. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industry pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Kecamatan Parungkuda dalam RTRW Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai kawasan gerakan tanah intensitas sedang, sehingga sewaktu-waktu bisa terjadi bencana longsor.

Rencana pola ruang wilayah Kecamatan Parungkuda dalam RDTR Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 akan diperuntukkan untuk :

1. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa atau berpotensi sebagai pusat kegiatan yang melayani desa/kelurahan yang ada di kecamatan tersebut,
2. Kawasan Perlindungan Setempat (kawasan sekitar situ);
3. Daerah pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;
4. Kawasan Peruntukan Hutan produksi terbatas
5. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
6. Kawasan Peruntukan Pertanian hortikultura, berupa tanaman sayuran dataran rendah
7. Kawasan peruntukan perkebunan besar swasta;
8. Kawasan peruntukan peternakan : (sapi perah dan sapi potong );
9. Kawasan peruntukan pertambangan, yaitu mineral logam;
10. Wilayah potensi pertambangan minyak dan gas bumi;
11. Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah (Perkampungan Industri Kecil (PIK) produksi enye dan budidaya puyuh);
12. Kawasan desa wisata;
13. industri pengolahan kayu, makanan dan minuman, industri karet, industri teh, industri batu hijau, dengan luas paling tinggi 15 (lima belas hektar);
14. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten yaitu KSK Agrobisnis Parungkuda sebagai Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi.

* 1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan ataupun sebaliknya. KLHS dimaksudkan untuk

menyelenggarakan analisis secara sistematik, menyeluruh, dan partisipatif sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi. KLHS bertujuan untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi, serta menjamin program/arahan kebijakan di Kabupaten Sukabumi telah memperhatikan keutuhan dan keselamatan lingkungan hidup. KLHS Kabupaten Sukabumi merupakan KLHS RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD. KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Muatan KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 terfokus pada 5 (lima) TPB prioritas sebagai berikut:

1. TPB 1 : Tanpa kemiskinan

2. TPB 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera

3. TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan

4. TPB 11 : Kota dan pemukiman yang berkelanjutan

5. TPB 15 : Ekosistem dara

**3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan permasalahan pembangunan, telaahan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, isu strategis nasional tahun 2020-2024, isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dinamika internasional, kebijakan RTRW Kabupaten Sukabumi, dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yaitu:

(1) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;

(2) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Permasalahan Sosial, dan Ketahanan Bencana;

(3) Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan Peningkatan Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah;

(4) Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Pendukung Aktivitas Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan

(5) Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kondisi Objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi dalam pencapaian visi kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam menganalisis lingkungan strategis Kecamatan Sagarantn Kabupaten Sukabumi menggunakan methode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

Analisis Lingkungan Internal (ALI) diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah dimiliki berupa kekuatan dan meminimalisasi kelemahan, sedangkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi Kecamatan Parungkuda adapun Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternai yang ada pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Parungkuda menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

1. **Analisis Lingkungan Internal**
2. **Faktor Kekuatan (*Strong*)**
3. Eksistensi dan legalitas lembaga kecamatan didukung Peraturan Perundang-undangan;
4. Adanya motivasi kerja Pegawai Kecamatan Parungkuda yang tinggi;
5. Adanya kemampuan pegawai yang kompleks ( bidang Teknologi Informasi, Administrasi dll;
6. Kerjasama antar pegawai yang baik.
7. **Faktor Kelemahan (*Weakness*)**
8. Belum cukupnya anggaran untuk pelaksanaan Tupoksi kecamatan;
9. Kemampuan manajerial di lingkup para pejabat yang tidak merata;
10. Terbatasnya jumlah pegawai kecamatan dalam memberikan pelayanan publik;
11. Status kepegawaian pelaksana yang sebagian besar masih berstatus tenaga Non PNS (TKS).
12. **Analisis Lingkungan Eksternal** 
    1. **Faktor Peluang ( *Opportunity* )** 
       * 1. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
         2. Ditetapkannya Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi yang merupakan pedoman perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
    2. **Faktor Ancaman ( *Threat* )** 
       * 1. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulakan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.
         2. Bervariasinya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

* 1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkar Daerah**

Berdasarkan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Parungkuda ini harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif, produktif serta amanah yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan tanggungjawab, serta sejalan dengan semangat reformasi bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan dan sistem manajemen kepemerintahan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, selaras dengan Visi Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

**“ *Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat sejahtera Lahir dan Batin”***

Adapun makna Visi tersebut adalah Kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Sukabumi sangat dipengaruhi oleh sikap keberagamaan (religius) dan kemandirian bahwa Kabupaten Sukabumi yang didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional diharapkan menjadi Institusi yang berwibawa yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk mencapai Visi Kabupaten Sukabumi yang telah ditetapkan maka telah dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan;
3. Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Parungkuda

Pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal, dan

melelahkan masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh

masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih

diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Untuk itu,

dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang maju, inovatif,

sejahtera lahir batin diperlukan adanya reformasi birokrasi di tataran

pemerintahan. Profesionalisme birokrasi merupakan persyaratan mutlak

untuk mewujudkan good governance, sedangkan akuntabilitas dan

transparansi birokrasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan clean

government. Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada

kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam

memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan

efisien. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas

pelayanan publik maka diperlukan aparatur pelayan publik yang kreatif,

inovatif bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mampu

membaca kebutuhan masyarakat. Inovasi pelayanan publik akan

ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan dunia dengan

mendigitalisasi pelayanan di semuasektor (e-government).

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan strategi-strategi yang dipilih serta menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai

gambaran impact pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dapat dirunut dari visi dan misi yang dirumuskan oleh organisasi.

Melalui misi organisasi kita dapat mengetahui untuk tujuan apa organisasi

itu didirikan dan mengapa organisasi itu ada**.**

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026

dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan

dengan menggunakan metodologi ilmiah dan didukung oleh data dan

informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya

dalam dokumen RPJMD ini. Tujuan dan sasaran merupakan buah hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) prog am-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih juga dapat menjembatani antara strategi dan arah kebijakan yang diambil selama periode RPJMD yang telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi dapat menjadi sarana untuk melaksanakan dan sekaligus sejalan dengan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 memiliki indikator kinerja yang SMART (Specific,

Measurable, Achievable, Relevant, Timebound) untuk menggambarkan capaian kinerja pembangunan secara kuantitatif. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU)

perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun ke depan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Dalam jangka panjang sasaran pembangunan daerah keberhasilannya dilihat dari capaian indikator akro yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Gini sebagaimana Tabel 5.1. I ndikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dimana keberhasilan maupun kegagalan pencapaiannya ditentukan oleh pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat sektoral, regional dan nasional,

sehingga diperlukan sinergi antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yaitu kerja sama vertikal pusat ke daerah, serta kerja

sama horizontal yang melibatkan perangkat-perangkat daerah yang

didukung dengan kerja sama antar para pemangku kepentingan.

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi akan mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 – 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Adapun tujuan pencapaian Misi Kabupaten Sukabumi yang selaras dengan Tupoksi Kecamatan antara lain :

Misi IV:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel

Tujuan :

1. Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani

Sasaran :

1. Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di kecamatan
2. Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan
3. Meningkatnya penerapan perda dan perkada di kecamatan
4. Menurunnya tingkat kerawanan social
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Kecamatan Parungkuda mulai dari unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Parungkuda**

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Eksisti-ng | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (9) | | (10) |
| Misi 1V : Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional, dan Akuntabel | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani** | Meningkatnya sfektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di kecamatan | Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan | 100% | 96,75% | 96,75% | 97,65% | 98,65% | 100% | 100% | | 100% |
|  |  | Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% |
|  |  | Meningkatnya penerapan perda dan perkada di kecamatan | Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada | 0% | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% | 0% | | 0% |
|  |  | Menurunnya tingkat kerawanan sosial | Persentase penurunan angka konflik social | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% |
|  |  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa | Rata-rata kepuasan masyarakat di tingkat Desa | 100% | 81,5% | 82% | 82,75% | 83.05% | 83.8% | 84.5% | | 100% |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi.Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan.Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk menyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indicator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan program dan kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.1 berikut ini:

Rumusan penyataan strategi dan kebijakan Kecamatan Sukalarang dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| **VISI :** Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir dan Bathin | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **MISI IV :** Meningkatkan kualitas pelayanan public yang inovatif, professional dan akuntabel | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| **Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani** | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur |
|  |  |  | Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintahan berbasiskan e-government |
|  |  |  | Meningkatkan perencanaan,pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan tterpadu, transparan, dan akuntabel |
|  |  |  | Meningkatkan redistribusi dan digitalisasi pelayanan public hingga ke desa dan kecamatan |
|  |  |  | Menata pusat pemerintahan palabuhanratu |
|  |  |  | Mendorong terbentuknya daerah otonomi baru (DOB) |
|  | Meningkatnya inovasi daerah | Meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/urusan daerah | Mendorong inovasi perangkat daerah berkelanjutan |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Indikator kinerja Kecamatan Parungkuda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Parungkuda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.Indikator kinerja Kecamatan Parungkuda mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini sebagaimana tertuang dalamTabel 6.1 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 6.1**

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

**Pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi**

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator  Kinerja Program  (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD | |  |  |
| Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. |
| (1) | (2) | (3) | **(4)** | 5) | 6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani | **Meningkatnya kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik** | Indeks Kepuasan Masyarakat | **7.01.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | 'Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik |  | **100%** | **2.727.125.256** | **100%** | **3.281.367.400** | **100%** | **3.337.367.350** | **100%** | **3.451.782.100** | **100%** | **3.451.782.100** | **100** | **16.249.424.206** | Kecamatan Parungkuda | Kecamatan Parungkuda |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah** |  |  | **100%** | **35.208.000** | **100%** | **66.768.000** | **100%** | **62.000.000** | **100%** | **64.000.000** | **100%** | **64.000.000** | **100** | **291.676.000** |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 'Output : Tesusunnya dokumen perencanaan renstra dan renja perangkat daerah yang akuntabel Outcome: dokumen renstra dan renja, RKA, DPA, RKAP,DPPA | - | 4 Dok | 9.768.000 | 1 Dok | 14.460.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 12.000.000 | 1 Dok | 12.000.000 | 100% | 58.228.000 |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 'Output :Koordinasi dan Singkronisasi RKA  Outcome :dokumen RKA | - | 1 Dok | 10.560.000 | 1 Dok | 13.540.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 12.000.000 | 1 Dok | 12.000.000 | 100% | 58.100.000 |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 'Output :Koordinasi dan Singkronisasi RKAP  Outcome :dokumen RKAP | - | 1 Dok | - | 1 Dok | 12.690.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 100% | 42.690.000 |
|  |  |  | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 'Output :Tesusunnya dokumen DPA Perangkat Daerah Outcome :dokumen DPA | - | 1 Dok | - | 1 Dok | 7.680.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 100% | 37.680.000 |  |  |
|  |  |  | '7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 'Output :Tesusunnya dokumen DPPA Perangkat Daerah Outcome :dokumen DPPA | - | 1 Dok | - | 1 Dok | 6.350.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 |  | 36.350.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Outcome :Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja | - | 4 Dok | 11.280.000 | 2 Dok | 12.048.000 | 2 Dok | 12.000.000 | 2 Dok | 10.000.000 | 2 Dok | 10.000.000 | 100% | 55.328.000 |  |  |
|  |  |  | **'7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** |  | - | **100 %** | **3.900.105.678** | **100%** | **2.359.164.800** | **100%** | **2.374.367.350** | **100%** | **2.580.500.450** | **100%** | **2.580.500.450** |  | **13.794.638.728** |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | output : Tersedianya anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai ASN outcome :gaji dan tunjangan ASN terpenuhi | - | 1 Tahun | 2.294.992.516 | 100% | 2.339.434.400 | 100% | 2.352.367.350 | 100% | 2.552.500.450 | 100% | 2.552.500.450 |  | 12.091.795.166 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | output :Tesusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah Outcome :dokumen laporan keuangan | 1 dok | 100 % | - | 1 Dok | - | 1 Dok | 6.000.000 | 1 Dok | 6.000.000 | 1 Dok | 6.000.000 |  | 18.000.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | output :Tesusunnya dokumen laporan keuangan semester Perangkat Daerah Outcome :dokumen laporan keuangan | 1 dok | 100 % | 8.520.000 | 1Dok | 12.230.000 | 1Dok | 12.000.000 | 1Dok | 12.000.000 | 1Dok | 12.000.000 |  | 56.750.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.03.05 | Penyusunan Laporan dan analisis Prognosisi Realisasi Anggaran | output :Tesusunnya dokumen laporan Prognosisis keuangan | 1 dok | 100 % | 11.160.000 | 1 Dok | 7.500.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 |  | 48.660.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.03 | **Administrasi Barang Miik Daerah pada Pemerintah Daerah** |  |  | 100% | 1.800.000 | 1 dok | 5.400.000 |  | 15.000.000 |  | 15.000.000 |  | 15.000.000 |  | 52.200.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Output : Terlaksanakannya Rekonsilaisi BMD | 12 bulan | 100 % | 1.800.000 | 12 bulan | 5.400.000 |  | 15.000.000 |  | 15.000.000 |  | 15.000.000 |  | 52.200.000 |  |  |
|  |  |  | **7.01.01.2.06** | **Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah** |  |  | **100%** | **31.883.600** | **100%** | **6.679.000** | **100%** | **15.000.000** | **100%** | **21.000.000** | **100%** | **21.000.000** |  | **95.562.600** |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.06.01 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Output :Koordinasi Kepegawaian , Outcome peningkatan kapasitas pegawai |  | 1 tahun | - | 1 tahun | - | 1 tahun | 5.000.000 | 1 tahun | 6.000.000 | 100% | 6.000.000 |  | 17.000.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.06.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Output :Tersedianya pakaian dinas , Outcome Terwujudnya disiplin pegawai |  | 26 stel | - | 24 stel | 6.679.000 | 24 stel | 10.000.000 | 24 stel | 15.000.000 | 24 stel | 15.000.000 |  | 46.679.000 |  |  |
|  |  |  | **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** |  | - | **100 %** | **489.769.592** | **100%** | **111.570.000** | **100%** | **80.000.000** | **100%** | **154.500.000** | **100%** | **154.500.000** |  | **990.339.592** |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Output :Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor , Outcome Peralatan dan perlengkapan kantor | - | 100 % | 29.800.000 | 100% | 42.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 |  | 116.800.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Output :Tersedianya peralatan rumah tangga , Outcome Terfasilitasinya kegiatan kantor | - | 100 % | 6.635.000 | 100% | 12.900.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 14.500.000 | 100% | 14.500.000 |  | 58.535.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Output :Tersedianya kebutuhan ATK , Outcome Lancarnya administrasi perkantoran | - | 100 % | - | 100% | 42.870.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 |  | 182.870.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Output :Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan , Outcome Terpenuhinya kegiatan administrasi kantor | - | 100% | 5.280.000 | 100% | 13.800.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 |  | 84.080.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Peundang-undangan | Output : Tersedianya bahan bacaan Outcome : Akuratnya informasi dan pemberitaan | - | 100% | 10.000.000 | 100% | - | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 |  | 40.000.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.06.09 | Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 'Output: Tesedianya mamin rapat rutin dan rapat pengajian serta rapat koordinasi Outcome: Terpenuhinyan kegiatan rapat-rapat di kecamatan | - | 100% | 21.600.000 | 100% | - | 100% | 35.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 35.000.000 |  | 126.600.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Output : Website , Outcome Pelayanan optimal |  |  | - | - | - | 100% | 25.000.000 | 100% | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 100% | 35.000.000 |  |  |
|  |  |  | **7.01.01.2.07** | **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** |  |  | **100%** | **1.099.316.259** | **100%** | **64.000.000** | **100%** | **95.000.000** | **100%** | **75.000.000** | **100%** | **75.000.000** |  | **1.408.316.259** |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 'Output: Mobil Dinas Camat  Outcome: Tergantinya mobil dinas |  |  | - | 100% | 52.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 |  | 227.000.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebeul | 'Output: Tesedianya Kursi, meja Outcome: meja kursi |  |  | - | 100% | 12.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 |  | 82.000.0000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 'Output: Rehabilitasi Bangunan kantor dan Rumah Dinas Outcome: tertatanya kantor kecamatan |  | - | - | - | - |  | 500.000.0000 |  | - |  | - |  | 500.000.000 |  |  |
|  |  |  | **7.01.01.2.08** | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** |  |  | 100% | 278.783.740 | 100% | 288.410.000 | 100% | 460.000.000 | 100% | 460.000.000 | 100% | 460.000.000 |  | 1.947.193.740 |  |  |
|  |  |  | **7.01.01.2.08.01** | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Output : Tersedianya jasa surat menyurat  Ouput : tertib administarsi |  | - | - | 100% | 22.800.000 |  | 85.000.000 |  | 85.000.000 |  | 85.000.000 |  | 277.800.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 'Output: Pembayaran Liostrik, Internet Outcome: tersedianya Listrik dan Internet |  | 1 tahun | 52.200.000 | 100% | 54.000.000 | 100% | 75.000.0000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 |  | 331.200.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 'Output: Honor Non PNS, Honor Da’I, BPJS Outcome: Terbayarkannya Honor |  | 1 tahun | 210.783.740 | 100% | 211.610.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 |  | 1.322.393.740 |  |  |
|  |  |  | **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  |  | **100%** | **429.710.000** | **100%** | **174.486.000** | **100%** | **150.000.000** | **100%** | **140.000.000** | **100%** | **140.000.000** |  | **899.196.0000** |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | 'Output: Pemeliharaan Kendaraan Dinas,Pajak, BBM Struktural Outcome: Terpeliharanya Kendaraan dinas dan Terbayarkannya BBM |  | 1 tahun | 53.146.000 | 1 tahun | 55.356.000 | 1 tahun | 75.000.000 | 1 tahun | 75.000.000 | 1 tahun | 75.000.000 |  | 333.502.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.09.05 | Pemelihraan Mebel | 'Output: Pemeliharaan Meja, lemari Outcome: Outcome: meja dan lemari terpelihara |  | 1 tahun | - | 1 tahun | 19.130.000 | 1 tahun | 25.000.000 | 1 tahun | 15.000.000 | 1 tahun | 15.000.000 |  | 74.130.0000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantir lainnya | 'Output: Pemeliharaan Gedung dan Rumah Dinas: Outcome: Kantor dan Rumah dinas tettata Rapih |  | 1 tahun | - | 1 tahun | 100.000.000 | 1 tahun | 150.000.000 | 1 tahun | 50.000.000 | 1 tahun | 50.000.000 |  | 400.000.000 |  |  |
| **Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani** | **Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di kecamatan** | **Survei Kepuasan Masyarakat** | **7.01.02** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik** |  | **1 tahun** | **-** | **1 tahun** | **41.032.000** | **1 tahun** | **46.000.000** | **1 tahun** | **191.854.000** | **1 tahun** | **191.854.000** |  | **470.740.000** |  |  |
|  |  |  | **7.01.02.2.01** | **Koordinas PenyelenggaraanKegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan** |  |  | **1 tahun** | **-** | **1 tahun** | **16.480.000** | **1 tahun** | **46.000.000** | **1 tahun** | **46.000.000** | **1 tahun** | **46.000.000** |  | **154.480.0000** |  |  |
|  |  |  | '7.01.02.2.02.01 | Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah dengan Prerangkat Daerah dan Instansi Terkait | 'Output: Sinergitas Outcome: Mamin Rapat, Uang saku |  | 1 tahun | - | 1 tahun | - | 1 tahun | 6.000.000 | 1 tahun | 6.000.000 | 1 tahun | 6.000.000 |  | 18.000.000 |  |  |
|  |  |  | '7.01.02.2.02.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | 'Output: Peningkatan Efektifitas Desa Outcome: Mamin Rapat, Uang saku |  | 1 tahun | - | 1 tahun | 16.480.000 | 1 tahun | 40.000.000 | 1 tahun | 40.000.000 | 1 tahun | 40.000.000 |  | 136.480.000 |  |  |
|  |  |  | **7.01.02.2.03** | **Koordinasi Prasarana dan sarana pelayanan Umu** |  |  | **-** | **-** | **-** | **15.000.000** | **1 tahun** | **15.000.000** | **1 tahun** | **15.000.000** | **1 tahun** | **15.000.000** |  | **60.000.000** |  |  |
|  |  |  | **7.01.02.2.03.01** | Koordinasi / Sinergi dengan rerangkat Daerah atau Instansi Vertikalyang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum |  |  | - | - | - | 15.000.000 | 1 tahun | 15.000.000 | 1 tahun | 15.000.000 | 1 tahun | 15.000.000 |  | 60.000.000 |  |  |
|  |  |  | **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** |  |  | **1 tahun** | **5-** | **100%** | **24.552.000** | **100%** | **25.000.000** | **100%** | **25.000.000** | **100%** | **25.000.000** |  | **99.522.000** |  |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan |  |  | 1 tahun | - | 100% | 24.552.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 |  | 99.522.000 |  |  |
| Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani | Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan | 'Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan | **7.01.03** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluharan** | **Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan** |  | 100% | **454.215.097.** | **100%** | **103.857.000** | **100%** | **110.000.000** | **100%** | **115.000.000** | **100%** | **115.000.000** |  | **898.072.097** |  |  |
|  |  |  | 7.01.03.2.01 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** |  |  | **100%** | **454.215.097** | **100%** | **103.857.000** | **100%** | **110.000.000** | **100%** | **115.000.000** | **100%** | **115.000.000** |  | **898.072.097** |  |  |
|  |  |  | 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa |  |  | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 |  | 150.000.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan |  |  | 100% | 454.215.097 | 100% | 103.857.000 | 100% | 110.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 |  | 748.072.097 |  |  |
| **Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani** | **Meningkatnya penerapan Perda dan perkada di kecamatan** | **Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada** | **7.01.04** | **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **'Persentase tingkat pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan** |  | **100%** | **14.892.000** | **100%** | **15.000.000** | **100%** | **15.000.000** | **100%** | **30.000.000** | **100%** | **30.000.000** |  | **104.892.000** |  |  |
|  |  |  | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** |  |  | **100%** | **14.892.000** | **100%** | **15.000.000** | **100%** | **15.000.000** | **100%** | **15.000.000** | **100%** | **15.000.000** |  | **74.892.000** |  |  |
|  |  |  | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat |  |  | 100% | 14.892.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 |  | 74.892.000 |  |  |
|  |  |  | **7.01.04.2.02** | **Koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah** |  |  | **-** | **-** | 100% | **15.000.000** |  | **15.000.000** | 100% | **15.000.000** | 100% | **15.000.000** |  | **60.000.000** |  |  |
|  |  |  | 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/sinergi dengan perangkat yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia |  |  | - | - | 100% | 15.000.000 |  | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 |  | 60.000.000 |  |  |
| **Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani** | **Menurunnya tingkat kerawanan sosial** | **Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial** | **7.01.05** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Persentase angka konflik sosial yang terselesaikan** |  | **-** | **-** | **100%** | **15.000.000** | **100%** | **15.000.000** | **100%** | **20.000.000** | **100%** | **20.000.000** |  | **70.000.000** |  |  |
|  |  |  | **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** |  |  | - | - | 100 % | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.000.000 |  | 70.000.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |  |  | - | - | - | - | 100% | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 |  | 15.000.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan |  |  | - | - | 100% | 15.000.000 | 100% | 5.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 |  | 50.000.000 |  |  |
| **Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani** | **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa** | **Survey Kepuasan Masyarakat di Tingkat Desa** | **7.01.06** | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Rata rata persentase tingkat kepuasan masyarakat di tingkat desa** |  | **100%** | **44.678.400** | **100%** | **60.000.000** | **100%** | **60.000.000** | **100%** | **60.000.000** | **100%** | **60.000.000** |  | **284.678.400** |  |  |
|  |  |  | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  |  | 100% | - | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 |  | 60.000.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa |  |  | 100% | 14.892.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 |  | 74.892.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  | 100% | 14.892.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 |  | 74.892.000 |  |  |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.12 | Fasilitasi Pelaksanan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |  |  | 100% | 14.892.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 |  | 74.892.000 |  |  |
| **Jumlah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Komitmen penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah dideskripsikan melalui indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan tanda yang dijadikan tolok ukur keberhasilan dari pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran, dan tujuan. Oleh karena itu indikator yang terbentuk juga akan menjadi gambaran dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Keluaran (output) mencerminkan berfungsinya proses dalam suatu lembaga dalam menjalankan kegitan operasional yang sifatnya rutinitas. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Komitmen penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah dideskripsikan melalui indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan tanda yang dijadikan tolok ukur erhasilan dari pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran, dan tujuan. Oleh karena itu indikator yang terbentuk juga akan menjadi gambaran dari keluaran (output), hasil outcome), dan dampak (impact). Keluaran (output) mencerminkan berfungsinya proses dalam suatu lembaga dalam menjalankan kegitan operasional yang sifatnya rutinitas. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (3) permendagri tersebut, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Di samping itu, terdapat pula capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Indikator makro pembangunan Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Indikator makro ini dipengaruhi oleh keberhasilan berbagai program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator makro tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Gini. Dalam penentuannya, peranan daerah dalam penentuan indikator makro

daerah sangat dipengaruhi oleh faktor luar seperti kebijakan nasional dan kondisi umum global maupun nasional. Oleh karenanya penting dalam penentuan indikator makro daerah untuk memperhitungkan banyak hal seperti target indikator makro nasional dan provinsi, kebijakan ekonomi makro dan kebijakan penanganan pandemi dalam asumsi yang diambil untuk penentuan target indikator makro daerah. Adapun beberapa asumsi yang diambil dalam penentuan target indikator makro daerah

Kabupaten Sukabumi adalah:

1. Vaksinasi selesai di tahun 2022;

2. Tidak ada pengurangan dana alokasi dari Pusat ke Daerah (untuk sektor unggulan);

3. Strategi penanganan pandemi sudah masuk ke tahap pemulihan ekonomi dari level nasional hingga daerah; dan

4. Inflasi stabil dengan acuan PDRB Deflator 1,46 di tahun 2020.

Proyeksi indikator makro Kabupaten Sukabumi dari tahun 2021 sampai

dengan tahun 2026 secara rinci

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan merumuskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengukur kinerja urusan pemerintahan daerah, pemerintah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Proyeksi target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026

Tabel T-C-28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| **NO** | **Indikator** | **Kondisi**  **Kinerja pada awal periode RPJMD** | **Target Capaian Setiap Tahun** | | | | | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun 0** | **Tahun 1** | **Tahun 2** | **Tahun 3** | **Tahun 4** | **Tahun 5** | **Tahun 6** | |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |  | **(8)** | | **(9)** |
| 1 | Persentase peningkatan kualitas pelayanan public | 96,75 | 96,75 | 92 | 87,65 | 98,65 | 99,65 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase tingkat pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Persentase angka konflik social yang terselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Rata rata persentase tingkat kepuasan masyarakat di tingkat desa | 81,5 | 82 | 82,75 | 83,05 | 83,8 | 98 | 84,5 | 84,5 | |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam kurun waktu 2021-2026. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen semua unsure pimpinan dan staf Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021 - 2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/ revisi muatan Renstra Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026. Akan tertapi keberhasilan tesebut harus didukung oleh sarana yang memadai dan anggaran yang optimal.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yaitu **“ *Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatis Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir dan Batin* ”**.

